



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

"Tema 6: Kebijakan, Rekayasa Sosial, dan Pengembangan Perdesaan"

PERAN JURNALIS MELALUI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DALAM MENCEGAH EKSTRIMISME DAN RADIKALISME DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA, BANYUMAS

Renny Miryanti¹, Soni Martin Anwar², Nuriyeni Kartika Bintarsari³, Muhammad Yamin⁴, Elpeni Fitrah⁵, dan Arif Darmawan⁶

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

⁶Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

ABSTRAK

Untuk mencegah semakin meluasnya ekstrimisme dan radikalisme di masyarakat, Pemerintah Banyumas telah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) hingga ke tingkat kecamatan sebagai respon terhadap kekhawatiran muncul dan berkembangnya paham-paham tersebut. Tulisan ini ditujukan untuk mendapatkan jawaban terkait upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh para jurnalis sebagai komponen penting dalam FKDM untuk mencegah penyebaran pemikiran dan paham radikalisme dan ekstrimisme di wilayah Banyumas khususnya Purwokerto Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan instrumen penelitian berupa observasi dan interview terhadap para jurnalis dari media massa lokal yang ada di wilayah Banyumas yang menjadi bagian dari FKDM. Adapun hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa peran jurnalis sangat signifikan dalam mencegah penyebaran paham-paham radikalisme dan ekstrimisme di wilayah Kecamatan Purwokerto Utara, Jurnalis telah melakukan fungsi-fungsi 4M FKDM yaitu menjangring, mengumpulkan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) sehingga dapat meminimalisir terjadinya gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Ekstrimisme, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Jurnalis, Peran, Radikalisme

ABSTRACT

In order to prevent the spread of extremism and radicalism in the society, the Government of Banyumas has established a Public Early Warning Forum/Forum Kewaspadaan Dini



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Masyarakat (FKDM) in responding to the emergence and expansion of radicalism and extremism in Banyumas region. This article is intended to obtain answers regarding any efforts made by journalists as an important component in the FKDM to prevent the spread of radicalism and extremism thought and action in the Banyumas region particularly in North Purwokerto. This research used qualitative descriptive with research instruments such as observations and interviews of journalists from local mass media in Banyumas region which are part of the FKDM. As results, the research obtained show that the role of the journalist is very significant in preventing the spread of radicalism and extremism in the area of North Purwokerto district, Journalist has performed the functions of FKDM namely networking, collecting, informing, and coordinating data and information from the public about the potential threats, challenges, obstacles and disruptions (ATHG) to minimize the occurrence of security disturbances in the society.

Keywords: Extrimism, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Journalist, , Radikalism, Role

PENDAHULUAN

Ancaman terhadap suatu negara bisa berasal dari dalam negeri (*internal*) maupun dari luar negeri (*eksternal*) seperti kekerasan, kejahatan, konflik horizontal dan vertikal dengan latarbelakang ideologi, agama, politik, ekonomi dan sosial budaya, terorisme, separatisme, spionase, sabotase, perang informasi, perang siber (*cyber war*), pengaruh paham-paham radikalisme dan ekstrimisme, keadaan darurat bencana alam dan sebagainya. Untuk menghadapi ancaman terhadap negara tersebut diperlukan langkah-langkah (*measures*) untuk mengantisipasi, menghadapi dan menghapus ancaman-anacam tersebut sehingga negara bisa terbebas dari segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi negara Indonesia. Beberapa langkah yang diambil di antaranya adalah langkah waspada yang dilakukan secara lebih dini terhadap segala bentuk dan fenomena ancaman terhadap negara yang muncul di dalam masyarakat atau yang biasa disebut sebagai kewaspadaan dini (*early warning*). Kewaspadaan Dini adalah “serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini (Permendagri, 2022). Dengan demikian upaya tersebut perlu dilakukan secara komprehensif yang melibatkan seluruh instrumen masyarakat.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Tulisan ini bertujuan untuk melihat lebih jauh peran dari jurnalis sebagai bagian dari unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM yang didirikan oleh Pemerintah Banyumas dalam upaya mencegah adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang bisa berasal dari kondisi internal maupun eksternal yang ada di lingkup masyarakat khususnya terkait radikalisme dan terorisme di Kabupaten Banyumas khususnya Kecamatan Purwokerto Utara sebagai salah satu wilayah yang sangat heterogen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana pendekatan ini mengkaji dan memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan atau memposisikan diri dalam fenomena tersebut dengan mengkonstruksi pemikiran kita sendiri. Dalam jenis penelitian ini, kebenaran diyakini sebagai sesuatu yang dinamis dan dapat ditemukan melalui penelaahan terhadap orang melalui interaksi sosial dengan mereka (Danim, 2000 dalam Dharma, 2008: 21- 22). Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Purwokerto Utara. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan para informan dari jurnalis Media Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat yang bertempat di Kabupaten Banyumas yang merupakan anggota FKDM, didukung anggota FKDM lainnya yaitu unsur pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banyumas, Camat Purwokerto Utara, unsur kepolisian dan unsur tentara yang ada lokasi penelitian serta Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak terkait. Adapun sumber data sekunder untuk mendukung penelitian ini dari jurnal, buku, laporan, prosiding seminar, data yang bersumber dari website pemerintah dan website media massa.

Metode pengumpulan data lainnya yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam observasi dan FGD sebagai bagian dari verifikasi lebih lanjut data yang telah didapatkan melalui wawancara. Meyer dalam Dharma (2008:70) menyatakan bahwa metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam menempatkan peserta sebagai produsen makna yang aktif dan tidak sekadar diposisikan secara pasif sebagai penyuplai informasi. Wawancara dianggap sebagai suatu momen yang merekam proses produksi makna yang dialami, baik oleh pewawancara maupun objek wawancara. Dalam penelitian ini, yang



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

menjadi peserta dalam wawancara mendalam adalah para jurnalis yang menjadi anggota FKDM dan informan terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pencegahan radikalisme dan terorisme diperlukan partisipasi berbagai elemen masyarakat secara luas. Dalam mengantisipasi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pemerintah Kabupaten Banyumas membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau biasa disingkat FKDM yang pengukuhan pengurusnya telah dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 lalu oleh Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein (Suara Banyumas, 2022). Menurut penjelasan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyumas, acara pengukuhan ini kemudian diikuti dengan sosialisasi rencana pembentukan FKDM di tingkat kecamatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya kegiatan pengukuhan seribu seratus (1100) orang sebagai pengurus FKDM di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas pada bulan November 2022 lalu (Aditya, 2022).

FKDM dibentuk untuk mencegah adanya ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang bisa berasal dari kondisi internal maupun eksternal yang ada di lingkup masyarakat. FKDM sendiri telah dibentuk sejak tahun 2018, namun pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir, menghambat dinamika pembentukan pengurus FKDM dan kegiatannya di kalangan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah menjadi dasar pembentukan Forum FKDM ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kewaspadaan Dini adalah "serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini (Permendagri, 2022)." Sedangkan yang dikategorikan sebagai ATHG adalah "setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial,



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

dan budaya maupun pertahanan dan keamanan (Permendagri, 2022).” Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 ini, FKDM terbentuk mulai dari Pemerintah Daerah tingkat Provinsi, kemudian merujuk ke pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, kemudian turun ke pemerintahan wilayah kecamatan, dan yang terakhir adalah terbentuknya FKDM di pemerintahan tingkat kelurahan/desa. Masing-masing tingkatan pemerintah daerah ini memiliki tugas yang spesifik sesuai dengan luas wilayahnya.

Kabupaten Banyumas telah membentuk kepengurusan FKDM hingga ke tingkat pemerintahan kelurahan/desa. Menurut pasal 17 Permendagri No. 46 Tahun 2019, FKDM di tingkat kabupaten/kota bertugas untuk: a) menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan b) memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah di daerah kabupaten/kota. Sedangkan tugas FKDM di tingkat kecamatan adalah: a) menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan b) memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di kecamatan. Sedangkan di tingkatan kelurahan atau desa, forum ini berfungsi untuk menopang semua kegiatan FKDM tingkat kecamatan. Adapun secara spesifik, wilayah Kecamatan Purwokerto Utara menjadi fokus penelitian karena keunikan dan heterogenitasnya yaitu banyaknya pendatang dari luar daerah Banyumas dan mahasiswa internasional yang tinggal di wilayah kecamatan ini, juga terdapat berbagai universitas besar baik negeri maupun swasta.

FKDM Banyumas terdiri dari beragam elemen dalam masyarakat seperti individu dalam masyarakat, penggiat UMKM, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), jurnalis dan sebagainya. Keterlibatan aktif dari para jurnalis di antaranya adalah jurnalis dari Suara Merdeka (SM) dan Kedaulatan Rakyat (KR), dimana keanggotaan jurnalis dalam FKDM dinilai akan mampu memperkuat FKDM, mengingat kapasitas dari jurnalis sebagai profesi yang memiliki tugas dan peran yang berhubungan erat dengan pengelolaan informasi yang berasal dan beredar di dalam masyarakat. Jurnalis sendiri menggambarkan peran mereka melalui cara-cara yang berbeda-beda. Studi mengenai konsep Peran Jurnalis (*journalists role*)



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

meberikan gambaran lebih baik dalam memahami bagaimana jurnalis menerapkan tugas-tugas profesional mereka dan bagaimana mereka menjelaskan tanggungjawab moral dan sosial mereka di dalam masyarakat (Mellado, 2015; Vos, 2017). Ada beberapa tulisan yang mengkategorisasikan peran-peran jurnalis dalam berbagai cara (Christians et.al., 2009; Donsbach and Patterson, 2004; Hanitzsh, 2007; Hanitzsh and Vos, 2018; Weaver and Wilhoit, 1996). Sementara beberapa penelitian tentang jurnalisme menunjukkan bahwa Peran Jurnalis (*Journalists Role*) tidaklah sama namun beragam antara satu negara dengan negara lainnya (Hanitzsch et. al, 2019). Mereka mengatakan bahwa ide-ide normatif dan kognitif jurnalis itu saling terjalin (*intertwine*) dengan kekuatan politik, ekonomi dan struktur media dimana jurnalisme itu berada.

Peran jurnalis (*journalists role*) mengacu pada bagaimana cara jurnalis memikirkan tujuan sosialnya dalam masyarakat, dan kepada siapa serta bagaimana mereka mengarahkan tujuan atau ambisi jurnalistiknya (Zamith, 2022) Terdapat dua hal yang berkaitan dengan peran jurnalis yaitu Orientasi Peran dan Kinerja Peran. Meskipun keduanya saling berkaitan, namun keduanya memiliki perbedaan. Orientasi Peran mengacu pada cara berpikir aktor jurnalistik atau jurnalis, sedangkan Kinerja Peran mengacu pada cara mereka bertindak, yang mungkin dibatasi oleh sejumlah faktor struktural. Oleh karena itu, Orientasi Peran yang paling diyakini oleh para jurnalis mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang sebenarnya yang dilakukan oleh para jurnalis tersebut dalam konteks tertentu. Namun demikian, mereka memainkan peran utama dalam menentukan bagaimana jurnalisme dan jurnalis dilegitimasi dalam konteks tersebut.

Ada empat orientasi peran jurnalistik utama yaitu peran pengawasan (*monitorial role*), peran kolaboratif (*collaborative role*), peran intervensionis (*interventionist role*), dan peran akomodatif (*accomodative role*). Peran-peran ini tidaklah eksklusif satu sama lain. Namun, peran-peran ini beroperasi dalam suatu rangkaian kesatuan atau kontinum sehingga seorang jurnalis dapat memegang teguh peran monitorial dan intervensionis. Selain itu, peran-peran ini mengacu pada cara berpikir yang paling umum yang ada di suatu negara dimana terdapat banyak variasi di dalam negara dan dalam sub bidang atau genre jurnalisme tertentu sehingga tingkat keberagaman di negara-negara semakin tinggi dan ini mendorong dilakukannya perbandingan jurnalisme antar negara (Zamith, 2022)



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Peran pengawasan (*monitorial role*) secara luas didasarkan pada cita-cita jurnalisisme yang bertindak sebagai "Estate Keempat" yang meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang berkuasa, membuat masyarakat tetap sadar akan perkembangan politik dan sosial yang besar, dan berupaya untuk menumbuhkan masyarakat yang berpikiran kritis. Istilah "Estate Keempat" sendiri pertama kali muncul di Prancis atau Eropa yang artinya bahwa jurnalis berada di posisi keempat setelah posisi yang pertama yaitu yang ditempati oleh Raja atau bangsawan, posisi kedua yaitu gereja dan posisi ketiga yaitu warga negara. Dengan kata lain, legitimasi jurnalis untuk berperan sebagai pengawas didasarkan pada hubungan jurnalisisme dengan otoritas politik. Jurnalis dapat bertindak sebagai pengamat kritis terhadap keputusan politik dan perilaku politik lainnya, menerbitkan berita yang obyektif ketika mereka menyadari adanya pelanggaran. Mereka juga dapat bertindak lebih proaktif untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi tentang isu-isu yang mereka anggap mencurigakan. Fungsi 'pengawas' jurnalisisme sangat terkait dengan peran ini. Jurnalis yang menjalankan peran ini cenderung mengatakan bahwa tugas mereka adalah "menyediakan informasi politik", "memantau dan meneliti politik", "memantau dan meneliti bisnis", dan "memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik."

Berdasarkan data wawancara yang telah dilakukan terhadap jurnalis Koran Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat yang bertugas di wilayah Kabupaten Banyumas, dalam kaitan peran kelompok jurnalis sebagai upaya pencegahan terorisme dan radikalisme, jurnalis yang tergabung dalam FKDM telah melakukan pemantauan dan identifikasi setelah menerima informasi atau laporan mengenai individu/kelompok yang mencurigakan, akan dilakukan pemantauan lebih lanjut untuk kemudian diteruskan laporan tersebut ke ketua FKDM Kabupaten Banyumas yang kemudian akan dilanjutkan ke Pemerintah untuk menjadi pertimbangan kebijakan lebih lanjut. Dalam laporan tersebut, jurnalis akan menginformasikan tentang data terkait dari individu/kelompok yang dicurigai, mulai dari data individu, tempat tinggal hingga aktivitas yang dilakukan sebagai penunjang informasi. Dalam hal ini, jurnalis Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat yang tergabung dalam FKDM telah berperan dalam proses pengawasan terhadap tindakan individu/kelompok yang berpotensi mengganggu menjadi ancaman dan gangguan di masyarakat.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Peran kolaboratif (*collaborative role*). Dalam peran ini, jurnalis bertindak sebagai mitra pemerintah dan mendukung upaya pemerintah mewujudkan pembangunan sosio-ekonomi dan kesejahteraan sosial. Orientasi peran ini menyerukan kepada jurnalis untuk mendukung pihak berwenang dalam mempertahankan tatanan sosial dari ancaman kejahatan, konflik, dan keadaan darurat alam. Dengan kata lain, dalam peran ini, jurnalis dapat aktif membela pemerintah dan kebijakannya dengan bertindak sebagai propagandis. Namun, mereka juga dapat berperan sebagai fasilitator sederhana dengan secara sukarela membantu pemerintah dalam upaya menjaga keharmonisan sosial, menjaga persatuan nasional, dan mendorong pembangunan bangsa. Selain itu, jurnalis mungkin menganggap bahwa memberikan legitimasi kepada pemerintah dengan menjelaskan keputusan politik kepada masyarakat dan membantu mengarahkan opini publik itu merupakan tanggung jawab mereka. Hal ini mungkin melibatkan penggunaan fungsi corong atau penguat suara, dimana jurnalis diantaranya bertujuan untuk meningkatkan komunikasi satu arah dari pejabat pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, jurnalis yang menjalankan peran ini cenderung mengatakan bahwa tugas mereka adalah "mendukung kebijakan pemerintah" dan "menyampaikan citra positif para pemimpin politik."

Dalam kaitan peran kolaboratif, jurnalis berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari unsur masyarakat, dimana masyarakat terlibat dalam pemberian informasi awal ke para jurnalis, yang kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan verifikasi lebih lanjut. Para jurnalis tersebut kemudian ketua FKDM memproses menjadi sebuah laporan dimana dalam laporan tersebut para jurnalis yang menjadi bagian dari FKDM memberikan rekomendasi dan saran kebijakan. Sebagai mitra pemerintah daerah, jurnalis melalui FKDM telah ikut berperan mencegah terjadi ancaman dan gangguan yang bisa mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat. Meskipun demikian, dalam tugas pengumpulan informasi tersebut juga ditemui berbagai hambatan dimana informan yang dituju sulit untuk ditemui dan diakses lebih lanjut beritanya, dan juga kekhawatiran akan keselamatan diri sendiri dan keluarga dikarenakan akses informasi yang dikumpulkan tergolong sensitive dan berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karenanya, jurnalis dalam FKDM juga mendapatkan berbagai pelatihan dalam pendeteksian, penggalian dan pelaporan dimana kegiatan tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan kelompok-kelompok intelijen negara antara lain Badan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Intelijen Negara (BIN), unsur TNI dan Kepolisian dalam rangka mendukung keberhasilan kerja FKDM.

Peran *intervensionis (interventionist role)* ditandai dengan kecenderungan yang kuat untuk menjalankan misi tertentu dan mempromosikan nilai-nilai tertentu. Jurnalis *intervensionis* biasanya terlibat, berkomitmen secara sosial, dan termotivasi untuk terlibat dalam urusan sosial dengan menganggap diri mereka sebagai peserta aktif dalam kehidupan politik dan bukan hanya sebagai juru tulis yang netral. Para jurnalis ini dapat bertindak sebagai pembela kelompok dan tujuan tertentu, sebagai misionaris untuk nilai-nilai dan ideologi tertentu, dan sebagai agen perubahan sosial. Hal ini dapat mencakup anggapan terhadap diri sendiri bahwa mereka bukan hanya sebagai juru bicara bagi masyarakat yang kurang beruntung secara sosial namun juga sebagai promotor aktif untuk tujuan-tujuan seperti pelestarian budaya asli atau untuk posisi politik yang terkait dengan partai politik tertentu. Dengan kata lain, jurnalis yang mengidentifikasi diri dengan orientasi peran ini berupaya menggerakkan masyarakat menuju apa yang mereka pikir bisa terjadi, dibandingkan sekedar hanya mencoba menggambarkan realitas sosial kontemporer. Jurnalis yang menjalankan peran ini cenderung mengatakan bahwa tugas mereka adalah “mengadvokasi perubahan sosial”, “mempengaruhi opini publik”, “menetapkan agenda politik”, dan “mendukung pembangunan nasional”. Negara-negara yang cenderung sangat mendukung peran ini adalah Kroasia, Siprus, dan Tanzania.

Adapun terkait peran *intervensionis*, Jurnalis yang tergabung dalam FKDM Kabupaten Banyumas tidak melakukan tindakan *intervensi* langsung, melainkan menginformasikan, melaporkan, mereka juga membuat rekomendasi dan saran kebijakan bagi para pembuat kebijakan untuk ditindak lebih lanjut dalam upaya pencegahan radikalisme dan ekstrimisme. Jurnalis juga melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap aktivitas mantan napi terorisme yang tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas. Meskipun bukan dalam bentuk tindakan *intervensi* langsung, sesungguhnya jurnalis telah melakukan peran *intervensionis* di masyarakat melalui pemberitaan dan pelaporan untuk mencegah perilaku yang mengarah pada ekstrimisme dan radikalisme di masyarakat.

Peran *akomodatif (accomodative role)* merupakan peran yang paling berorientasi pada bagaimana memandang khalayak jurnalistik sebagai konsumen (bukan sebagai warga negara).



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Jurnalis yang memiliki peran akomodatif berusaha keras untuk memberikan informasi yang paling menarik bagi khalayak atau publik. Peran ini bisa berupa jurnalisme konsumen yang menampilkan ulasan produk komersial dan evaluasi aktivitas waktu senggang, serta konten berita yang dapat anda gunakan seperti kolom saran dan informasi tentang pengelolaan kehidupan sosial sehari-hari. Dengan kata lain, orientasi peran ini tidak terlalu menekankan pada jurnalisme layanan publik dan lebih menekankan pada apa yang disebut jurnalisme berita ringan dimana hal tersebut adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh khalayak jurnalistik. Oleh karena itu, jurnalis yang menjalankan peran ini cenderung mengatakan bahwa tugas mereka adalah “menyediakan hiburan dan relaksasi”, “menyediakan berita yang menarik khalayak terbesar”, dan “memberikan nasihat, orientasi, dan arahan dalam kehidupan sehari-hari.”

Dalam hal peran akomodatif ini, jurnalis yang tergabung dalam FKDM menyediakan berita yang menarik bagi publik dimana dalam beberapa tahun terakhir ini persoalan terorisme dan radikalisme merupakan salah persoalan dan isu utama di masyarakat, setelah sebelumnya jurnalis melakukan penyidikan dan pelaporan berita yang didapat mengenai persoalan yang bisa menjadi ancaman dan gangguan di dalam masyarakat. Dalam pemberitaan yang disampaikan terkait hal diatas didasarkan atas upaya penyadaran di masyarakat akan bahayanya tindakan radikalisme dan terorisme yang bisa mengancam stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam kehidupan bernegara. Jurnalis yang tergabung dalam FKDM mengakomodasi kekhawatiran negara akan berkembangnya paham dan perilaku yang mengarah pada ekstrimisme dan radikalisme dengan terlibat dalam peran sosial melalui kegiatan yang menjaring, mengumpulkan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) sehingga dapat meminimalisir terjadinya gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam hal keanggotaan dan keterlibatan secara aktif di dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), jurnalis dari Suara Merdeka (SM) dan Kedaulatan Rakyat (KR) di wilayah Kabupaten Banyumas, Indonesia, secara efektif telah memainkan peran signifikan dalam upaya mengatasi ancaman dan gangguan keamanan di masyarakat di Kabupaten



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Banyumas khususnya Kecamatan Purwokerto Utara. Para jurnalis yang tergabung dalam FKDM Banyumas menganut orientasi peran kolaboratif (*collaborative role*) dan peran intervensionis (*interventionist role*). Peran kolaboratif (*collaborative role*) mendukung pihak berwenang dalam mempertahankan tatanan sosial dari ancaman kejahatan, konflik, dan keadaan darurat alam. Peran intervensionis (*interventionist role*) berkomitmen secara sosial, dan termotivasi untuk terlibat dalam urusan sosial dengan menganggap diri mereka sebagai peserta aktif dalam kehidupan politik dan bukan hanya sebagai juru tulis yang netral. Dengan demikian, jurnalis yang menjadi bagian dari FKDM telah bertindak aktif dan efektif dalam pencegahan penyebaran paham dan perilaku yang mengarah kepada ekstrimisme, radikalisme dan terorisme di Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman atas pembiayaan penelitian ini melalui Hibah Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Ivan. 6 Oktober 2022. Bakesbangpol Ngebut Bentuk FKDM Kecamatan dan Desa. *Kedaulatan Rakyat Online*. Diunduh dari: <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/475781/bakesbangpol-ngebut-bentuk-fkdm-kecamatan-dan-desa>
- Christians, Clifford G., et.al, 2009. *Normative Theories of The Media, Journalism in Democratic Societies*. Urbana and Chicago : University of Illinois Press
- Donsbach, Wolfgang, Patterson, Thomas E., 2004. *Comparing Political Communication : Political News Journalists, Partisanship, Professionalism, and Political Roles in Five Countries*. Political Science. Doi: 10.1017/CBO9780511606991.012.
- Donsbach, Wolfgang , Patterson, Thomas E., 2004. *Psychology of News Decisions Factors Behind Journalists' Professional Behavior*. *Journalism*5(2):131-157. Doi:10.1017/CBO9780511606991.012.
- Hanitzsch, Thomas, and Tim P. Vos. 2017. *Journalistic Roles and the Struggle Over Institutional Identity: The Discursive Constitution of Journalism*. *Communication Theory* 27 (2): 115–135.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

- Hanusch, Folker. 2013. *Journalists in Times of Change: Evidence From a New Survey of Australia's Journalistic Workforce*. Australian Journalism Review 35 (1): 27–40.
- Howard, Marcus E., 2019. *How Journalists and The Public Shape Our Democracy ? From Social Media and "Fake News"* . Georgia: The Atlanta Press
- J. Curran, 1991. *Mass-media and Society*, Michael Gurevitch Printing House: Routledge
- Mellado, Claudia , 2015. *Professional Roles and news Construction: A Media Sociology Conceptualization of Journalists' Role Conception and Performance*. *Communication and Society*. 28 (3), 1-12. <https://doi.org/10.15581/003.28.35948>
- United Nations. 2022. Sustainable Development. Diunduh dari: <https://sdgs.un.org/goals/goal16>
- Surya, Dharma,(2008). *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian* . Direktorat Pendidikan. Jakarta
- Wahyudi, Agus. 17 Juni 2022. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Banyumas diaktifkan lagi. *Suara Merdeka Online*. Diunduh dari: <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/pr-093679703/forum-kewaspadaan-dini-masyarakat-di-banyumas-diaktifkan-lagi>
- Weaver, David. H., Wilhoit, G.C. 2018. *The American Journalist in The Digital Age : Another Look at U.S. News People*. *Journalism and Mass Communication Quarterly*. 9(1) <https://doi.org/10.1177/1077699018778242>
- Zamith, Rodrigo, 2022. *The International Journalism Handbook. Concepts, Challenges and Context*. Amherst: UMass Amherst Libraries.